

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
ORGANISASI NIRLABA**

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Daftar Isi	i
II. Surat Pernyataan Pengurus	ii
III. Laporan Auditor Independen	iii
IV Laporan Posisi Keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Per 31 Desember 2023 dan 2022	1
V. Laporan Penghasilan Komprehensif Partai Gerakan Indonesia Raya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	2
V. Laporan Aktivitas Partai Gerakan Indonesia Raya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	3
VI. Laporan Arus Kas Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	4
VII. Catatan Atas Laporan Keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	5 - 34



DEWAN PIMPINAN PUSAT **GERINDRA** PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

SURAT PERNYATAAN PENGURUS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 YANG DISAJIKAN KEMBALI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, MA
Alamat : Jl. Harsono RM No. 54
Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Jabatan : Bendahara Umum
2. Nama : Satrio Dimas Adityo, MBA
Alamat : Jl. Harsono RM No. 54
Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Jabatan : Wakil Bendahara Umum

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Partai Gerindra.
2. Laporan keuangan Partai Gerindra telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Partai Gerindra dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Partai Gerindra tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Partai Gerindra.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Juli 2025



Thomas A.M Djiwandono, MA
Bendahara Umum



Satrio Dimas Adityo, MBA
Wakil Bendahara Umum

Laporan No. 00317/2.999/AU.2/11/0138-8/1/VII/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Jakarta

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Partai Gerakan Indonesia Raya ("Partai Gerindra")** terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Partai Gerindra tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang disajikan dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 – Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Partai Gerindra berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan suatu hal

Kami menarik perhatian ke Catatan 3 atas laporan keuangan terlampir yang menguraikan tentang Penyajian Kembali atas beberapa akun yang berdampak pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Kami juga mengaudit penyesuaian yang digunakan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2023 sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan. Menurut pendapat kami, penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan dan kesalahan.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Partai Gerindra dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Partai Gerindra atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Partai Gerindra.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Partai Gerindra.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Partai Gerindra untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Partai Gerindra tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DJOKO, SIDIK & INDRA**

 **DSI**

Drs. Abubakar Sidik, MS, CPA, CA
NRAP AP. 0138

Jakarta, 21 Juli 2025



PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

<u>ASET</u>		2023	
	<u>Catatan</u>	Disajikan Kembali	2022
		<u>Catatan 3</u>	
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	2b,2c,2d,4	154.355.443.951	6.758.167.942
Piutang lain-lain	2e,5	13.701.362.051	78.697.412.051
Biaya dibayar dimuka	2f,6	26.152.641	14.327.600
Jumlah Aset Lancar		168.082.958.643	85.469.907.593
ASET TIDAK LANCAR	2g,2h,7		
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp4.964.067.043 tahun 2023 dan Rp4.131.280.350 tahun 2022		3.239.705.037	2.774.586.750
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.239.705.037	2.774.586.750
JUMLAH ASET		171.322.663.680	88.244.494.343
LIABILITAS DAN ASET BERSIH			
LIABILITAS			
Pendapatan diterima dimuka	8	112.681.004.475	-
Biaya yang masih harus dibayar	2j,9	49.950.000	44.400.000
Hutang lain-lain	2m,10	-	161.059.900
Jumlah Liabilitas		112.730.954.475	205.459.900
ASET NETO	2n,26,27		
Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya		58.591.709.205	88.039.034.443
Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya		-	-
Jumlah Aset Neto		58.591.709.205	88.039.034.443
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		171.322.663.680	88.244.494.343

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	2023 <i>Disajikan Kembali</i> <u>Catatan 3</u>	<u>2022</u>
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Penerimaan:			
Iuran anggota DPR RI	<i>2o,12</i>	12.433.500.000	12.995.500.000
Iuran anggota DPRD Provinsi, Kabupaten	<i>2o,13</i>	141.526.528.806	116.059.884.515
Sumbangan pengurus	<i>2o,14</i>	449.100.000	-
Sumbangan perorangan	<i>2o,15</i>	1.000.000.000	-
Penerimaan lain-lain	<i>2o,16</i>	355.839.344	186.586.498
Jumlah		<u>155.764.968.150</u>	<u>129.241.971.013</u>
Penyaluran :			
Beban kegiatan DPP	<i>2p,18</i>	2.148.000.000	4.610.842.962
Beban program bidang	<i>2p,19</i>	707.700.000	388.386.750
Beban kegiatan sayap Partai	<i>2p,20</i>	1.078.037.883	1.094.599.563
Beban kampanye	<i>2p,21</i>	30.438.800.000	
Beban bakti sosial	<i>2p,22</i>	110.802.900	870.484.558
Beban publikasi dan kehumasan	<i>2p,23</i>	12.262.662.400	5.238.128.808
Beban umum dan administrasi	<i>2p,24</i>	138.423.944.581	109.133.541.339
Beban lain-lain	<i>2p,25</i>	42.345.624	18.352.724
Jumlah		<u>185.212.293.388</u>	<u>121.354.336.704</u>
Surplus (Defisit)		<u>(29.447.325.238)</u>	<u>7.887.634.309</u>
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Penerimaan:			
Kas Negara melalui APBN	<i>2o,11</i>	17.594.839.000	17.594.839.000
Penyaluran :			
Beban kegiatan Partai	<i>2p,17</i>	17.594.839.000	17.594.839.000
Surplus (Defisit)		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF		<u>(29.447.325.238)</u>	<u>7.887.634.309</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2023 <i>Disajikan Kembali</i> Catatan 3	2022
ASET NETO TANPA PEMBATASAN		
DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	88.039.034.443	80.151.400.134
Surplus (defisit) tahun berjalan	<u>(29.447.325.238)</u>	<u>7.887.634.309</u>
Saldo Akhir Aset Neto Tanpa Pembatasan	<u>58.591.709.205</u>	<u>88.039.034.443</u>
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN		
DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	-	-
Surplus tahun berjalan	-	-
Saldo Akhir Aset Neto Dengan Pembatasan	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL ASET NETO	<u>58.591.709.205</u>	<u>88.039.034.443</u>

*Catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	2023 <i>Disajikan Kembali</i> <u>Catatan 3</u>	<u>2022</u>
AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas Dari :			
Kas Negara melalui APBN	2o,11	17.594.839.000	17.594.839.000
Iuran anggota DPR RI	2o,12	12.433.500.000	12.995.500.000
Iuran anggota DPRD Provinsi, Kabupaten	2o,13	141.526.528.806	116.059.884.515
Sumbangan pengurus	2o,14	449.100.000	-
Sumbangan perorangan	2o,15	1.000.000.000	-
Penerimaan lain-lain	2o,16	355.839.344	186.586.498
Jumlah		<u>173.359.807.150</u>	<u>146.836.810.013</u>
Pengeluaran kas untuk :			
Beban kegiatan Partai	2p	(201.932.000.071)	(138.470.654.422)
Piutang lain-lain	2e,5	64.996.050.000	(9.695.150.000)
Biaya dibayar dimuka	2f,6	(11.825.041)	(6.880.400)
Pendapatan diterima dimuka	8	112.681.004.475	-
Biaya yang masih harus dibayar	2j,9	5.550.000	(26.900.000)
Hutang lain-lain	2m,10	(161.059.900)	-
Beban lain-lain	2p,25	(42.345.624)	(18.352.724)
Jumlah		<u>(24.464.626.161)</u>	<u>(148.217.937.546)</u>
Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi		<u>148.895.180.989</u>	<u>(1.381.127.533)</u>
AKTIVITAS INVESTASI			
Pembelian aset tetap	2g,2h,7	<u>(1.297.904.980)</u>	<u>(1.561.671.500)</u>
Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		<u>(1.297.904.980)</u>	<u>(1.561.671.500)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		147.597.276.009	(2.942.799.033)
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		<u>6.758.167.942</u>	<u>9.700.966.975</u>
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN		<u>154.355.443.951</u>	<u>6.758.167.942</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Partai Gerakan Indonesia Raya selanjutnya disebut (Gerindra) merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Partai Gerindra juga merupakan organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 6 Pebruari 2008 dari Liena Latief, SH Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 30 September 2020 dari Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH, mengenai perubahan Susunan Pengurus Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Perubahan akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 22 Oktober 2020.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pelaksana Tertinggi Partai Gerindra yang bersifat kolektif. Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang :

1. Membuat Program Kerja Tahunan dan Peraturan Partai Gerindra di Tingkat Nasional berdasarkan kebijakan Dewan Pembina dan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Pimpinan Nasional.
2. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah.
3. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan keputusan Musyawarah Cabang.
4. Menetapkan komposisi dan personalia Pengurus Partai tingkat DPP, DPD dan DPC atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
5. Menetapkan komposisi dan personalia Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Pakar atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
6. Menetapkan dan mengajukan bakal calon anggota legislatif DPR dan DPRD Propinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
7. Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
8. Menetapkan dan mengajukan calon Menteri, Duta Besar, jabatan dalam Pemerintahan dan jabatan publik lainnya dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
9. Memberi rekomendasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
10. Memberi rekomendasi calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Walikota dari partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
11. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.
12. Memberi penghargaan sesuai ketentuan AD/ART atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
13. Memberikan sanksi sesuai ketentuan AD/ART, berdasarkan putusan sidang Majelis Etik dan Kehormatan.
14. Menyelenggarakan Kongres.
15. Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
16. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
17. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
18. Menyelenggarakan konferensi Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
19. Membentuk Badan atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di tingkat Pusat dan daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
20. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Badan atau Lembaga lain dan Partai Politik atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
21. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
22. Membentuk Organisasi Sayap atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
23. Melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Melaksanakan pergantian calon terpilih anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

25. Memberhentikan Pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai di tingkat DPP, DPD dan DPC.
26. Memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah Partai.

Jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sejumlah 34 (Tiga puluh empat) Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sejumlah 497 (Empat ratus sembilan puluh tujuh) Cabang.

Tujuan pembentukan organisasi adalah :

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Berjuang memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, hukum, dan keadilan.
5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.
6. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.

Untuk menunjang pelaksanaan aktivitasnya Partai Gerakan Indonesia Raya didukung dengan dana yang diperoleh dalam bentuk :

1. Iuran anggota dan iuran Pengurus Partai
2. Sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat
3. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN)
4. Sumbangan penghasilan dari anggota DPR dan DPRD

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 30 September 2020 dari Ilmiawan Dektrit Supatmo,SH,MH Notaris di Jakarta, susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra adalah sebagai berikut :

Ketua Umum	: Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Pemenangan Pemilu	: Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH
Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi, Keanggotaan dan Pemenangan Pemilu	: Prasetyo Hadi
Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi	: Rohmat Marzuki
Ketua Bidang Kaderisasi	: Eko Wibowo
Ketua Bidang Sekolah Kader	: Kharisma Febriansyah
Ketua Bidang Keanggotaan	: Oktasari Sabil
Ketua Bidang Organisasi Sayap	: Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, SE, ME
Ketua Bidang Pembinaan Pengurus Luar Negeri	: Hj. Himmatul Aliyah, S, Sos, M.Si
Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota Legislatif Daerah	: Bambang Haryadi, SE
Ketua Bidang Pemberdayaan Kepala Daerah	: Andi Seto Gadysta Asapa, SH, LL.M
Ketua Bidang Logistik Partai	: Adnani Taufiq, S. Sos.
Ketua Bidang Saksi Pemilu	: Rizaldy Danar Priambodo
Ketua Bidang Pemetaan dan Basis Pemilih dan TPS	: Ricky HS Tamba
Ketua Bidang Kerjasama dengan Penyelenggaraan Pemilu	: Victor Da Costa
Ketua Bidang Kampanye Digital	: Ir. Setyoko
Ketua Bidang Rekayasa Teknologi	: Gumilar Satriawan, ST
Ketua Bidang Penguatan Jaringan Kader	: Hj. Novita Wijayanti, SE, MM
Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi	: Haerul Saleh, SH

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Ketua Bidang Pengelolaan Opini Publik	: Vasco Ruseimy
Ketua Bidang Pemberdayaan Media Sosial	: Lie Suratno
Ketua Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat dan LSM	: Ir. Iwan Sumule
Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri	: Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri	: Irawan Ronodipuro
Ketua Bidang Kerjasama Asia Pasifik dan Afrika	: Adien Algadri
Ketua Bidang Kerjasama Amerika dan Eropa	: Edin Hadzalic, B. Sc
Ketua Bidang Timur Tengah	: H. Ricky Kurniawan, Lc.
Ketua Bidang Kerjasama ASEAN	: Drs. Marta Yandry, SE, SH, MM
Ketua Bidang Kerjasama Multilateral	: Ilman Zikri
Ketua Bidang Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia	: George Edwin Sugiharto
Ketua Bidang Hukum Internasional	: Irmawaty Habie, SH
Ketua Bidang Perjanjian Antar Negara	: Hafif Assaf, SIP, MA
Ketua Bidang Kajian Kerjasama antar Parlemen	: Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.
Ketua Bidang Komunikasi Internasional	: dr. Irene, M.Sc, Sp.A.
Ketua Bidang Publikasi Luar Negeri	: Drs. Beydra Yendi, MBA
Ketua Bidang Pendidikan Luar Negeri	: Abdul Hakam Nagib
Wakil Ketua Umum Bidang Adeologi, Politik	
Pemerintahan, Disiplin Partai dan Informasi Strategis	: Sugiono
Ketua Bidang Informasi dan Kajian Strategis	: Danang Wicaksana Sulistya
Ketua Bidang Pembinaan Ideologi	: Ibnu Ariebowo, SH
Ketua Bidang Pembinaan Kerja Sama antar Lembaga	
Non Parpol	: Abdur Rahim Hasan
Ketua Bidang Kerja Sama Antar Partai Politik	: H. Abdul Harris Bobihoe, S.Sos, M.Si.
Ketua Bidang Pembinaan Disiplin dan Tradisi Partai	: Chusni Mubarak, SH, MM.MH.
Ketua Bidang Informasi dan Teknologi	: Herry Sumartono
Ketua Bidang Pengolahan Data Strategis dan Pemetaan	
Geodemokonsos	: Mochamad Hengky Kusuma Praja Cahyono
Ketua Bidang Pengelolaan Informasi	: Benny Gusman Sinaga, ST.
Ketua Bidang Pengelolaan Basis Data Kepartaian	: Fadli Tri Hartono
Ketua Bidang Penataan Aset Partai	: Farouk Mateus L. Osorio, SE, MM
Ketua Bidang Dokumentasi dan Sejarah Partai	: Bachren Luskardinul
Ketua Bidang Pemerintahan Umum	: Dr. H. Azikin Soltan, M.Si.
Ketua Bidang Pelaksana Otonomi Daerah	: Drs. H.M. Asrian Mirza, MM
Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Pemerintah	: Ade Rezki Pratama, SE, MM.
Ketua Bidang Kebijakan Keuangan Daerah	: H. Dairul, SE, M.Si
Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH.
Ketua Bidang Penyiaran	: Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin, S.Si, MM
Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup	: Edhy Prabowo, MM., MBA
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan	: Dr. Safri, SE, M.Si.
Ketua Bidang Pertanian	: G. Budisatrio Djiwandono
Ketua Bidang Peternakan	: Agus Handoko
Ketua Bidang Perdagangan	: Heri Gunawan, SE
Ketua Bidang Investasi dan Pasar Modal	: Ardhya Pratiwi S, SE
Ketua Bidang Pertanian	: Anak Agung Bagus Jelantik Sanjaya, MBA
Ketua Bidang Pendapatan Negara	: H.M Husni, SE
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan	: Drs. H. Mulyadi, MMA
Ketua Bidang Perindustrian	: Mohamad Hekal, MBA

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Ketua Bidang BUMN	: Alex Yordanto
Ketua Bidang Ekspor dan Impor	: Drs. H. Subarna, SE, M.Si
Ketua Bidang Ekonomi Internasional	: Ahmad Bahtiar Sebayang, SE
Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	: Iis Edhy Prabowo, S.Hum, MM
Ketua Bidang Ekonomi Makro	: Andi Debby Yudhista Asapa, SH
Ketua Bidang Ekonomi Mikro	: Bei Mahaya Djody
Ketua Bidang Transmigrasi	: Eddy DJ. Wibowo, SH
Ketua Bidang Sosial Ekonomi Pertanian	: Farida Eddy
Ketua Bidang Konservasi Alam dan Lingkungan	: Waskita Rini
Ketua Bidang Agraria	: Renny Astuti, SH, Sp.N
Ketua Bidang Pertambangan	: Boegi Nugraha
Ketua Bidang Pariwisata	: Ali Zamroni, S.Sos.
Ketua Bidang Promosi dan Pemasaran Wisata	: Ir. Hj. Athea Sarastiani, MM
Ketua Bidang Pengembangan dan Pelestarian Objek Wisata	: Martini, SE
Ketua Bidang Transmigrasi	: Sammy Djusman, SE
Ketua Bidang Kerjasama Ekonomi	: Dr. Angga Wira, MM
Ketua Bidang Kesejahteraan Nelayan	: Fernando Jose Lemos Osorio Soares, ST
Ketua Bidang Analisis Kebijakan Pertambangan	: Andhika Surya Gumilar
Ketua Bidang Perhubungan	: Muh. Husein Fadlulloh, B,Bus,MM
Ketua Bidang Lingkungan Hidup	: Rudi Wijaya, SE
Ketua Bidang Konservasi Alam dan Lingkungan	: Siti Juliati
Ketua Bidang Kehutanan	: Ir. KRT.H. Darori Wonodipuro, MM
Ketua Bidang Pertanahan	: Yoelius Dwi Hermanus, SH, M.Si.
Ketua Bidang Budaya Perikanan	: Hardjono Siswanto, SE, M.Si
Ketua Bidang Ketahanan Pangan	: drh. Muchlindo Apriliast
Ketua Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi	: Muhammad Habibie
Ketua Bidang Energi dan Kelistrikan	: Ramson Siagian, MBA
Ketua Bidang Energi Terbarukan	: Agus Trianto
Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Keamanan	: Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun
Ketua Bidang Pertahanan Darat	: Mayjen TNI (Purn) Arri Sujono
Ketua Bidang Pertahanan Laut	: Laksma TNI (Purn) Rajamorni Harahap, SE, MM
Ketua Bidang Pertahanan Udara	: Marsda TNI (Purn) Hasan Londang, M.SS
Ketua Bidang Ketahanan Nasional	: Ikhwan Amirudin, SE, MM
Ketua Bidang Pertahanan Daerah	: Agustina Foeh
Ketua Bidang Bela Negara	: Dadeng Saepudin, SE
Ketua Bidang Keamanan Nasional	: Kolonel TNI (Purn) Suhary, Z.B.
Ketua Bidang Kerjasama dengan TNI/Polri	: Brigjen Pol. (Purn) Drs. Wenny Warouw
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana	: Yudi Handoko
Ketua Bidang Pemulihan Psikologi Pasca Bencana	: Dra. Julia Chartika, SH
Ketua Bidang Penanggulangan Terorisme	: Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc
Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Potensi Jaringan, Koperasi dan UMKM	: Dr. Ferry Joko Yulianto, SE,Ak,Msi.
Ketua Bidang Penggalangan Massa	: Didik Hariyanto
Ketua Bidang Penggalangan Kaum Perempuan	: Etty Suryo
Ketua Bidang Relawan	: Dra. Suria Ati Kusuma
Ketua Bidang Kerjasama Organisasi Perempuan	: Edriana, SH, MA
Ketua Bidang Sosial	: Yetti Wulandari, SH
Ketua Bidang Pendayagunaan Ekonomi Rakyat	: M. Mujiburohman
Ketua Bidang Koperasi	: Adji Gutomo

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Rakyat	: Setyo Edy
Ketua Bidang Komoditas Pasar Rakyat	: Hj. Aisyah Tiar Arsyad, SE, MBA
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif	: Widiyanto Saputro
Ketua Bidang Ekonomi Digital	: Hj. Gina Fadlia Swara, SE, MM
Ketua Bidang UMKM	: Kiki Setiawan
Ketua Bidang Pembinaan Pedagang Kaki Lima	: Ir. Lisca Suryani
Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan	: drg. Putih Sari
Ketua Bidang Kesehatan	: dr. Benyamin Paulus Oktavianus, Sp.P.
Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat	: Ir. Sri Meliyana
Ketua Bidang Kesehatan Ibu dan Anak	: Grace Rosalyn
Ketua Bidang Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	: Erni Djohan, S.Pd, M.Si.
Ketua Bidang Penyuluhan Kesehatan dan Gizi	: Noveria Parasari
Ketua Bidang Keluarga Berencana	: Dr. Paramitha Sudarto, MPH
Ketua Bidang Sarana Prasarana Kesehatan	: dr. Selvi Relita Fitri, MARS.
Ketua Bidang Farmasi	: dr. Mirna Annisa, M.Si.
Ketua Bidang Tenaga Kesehatan	: Dedi Supratman, SKM, MKM
Ketua Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	: Ir. Pertiwi Awilda, MBA
Ketua Bidang Kesehatan Tradisional	: dr. Suir Syam, M.Kes
Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	: dr. Felicitas Tallulembang
Ketua Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat	: Dra. Meiske Margaretha Mangalun, SE,MM
Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	: dr. Muhammad Atras Mafazi, MM
Ketua Bidang Kesejahteraan Tenaga Pendidik	: dr. Bambang Susanto
Ketua Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan	: Obon Tabroni
Ketua Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Terampil	: Dewi Sigar
Wakil Ketua Umum Bidang Pemuda, Perempuan dan Anak	: Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo
Ketua Bidang Kepemudaan	: Aryo P.S. Djojohadikusumo
Ketua Bidang Olahraga	: Abdul Karim Aljufri
Ketua Bidang Penanggulangan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang	: dr. Hj. Asri Kahar Muang, MH.Kes.
Ketua Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang	: Harwendro Adityo Dewanto
Ketua Bidang Perlindungan Hak dan Kesetaraan Perempuan	: Dra. Anita Ariyani
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan	: Sasha Tutuko
Ketua Bidang Tenaga Kerja Wanita	: Ir. Dwitaria Gunadi
Ketua Bidang Pemberdayaan Kader Perempuan	: Ir. Hj. Endang Sulistriani
Ketua Bidang Kependudukan	: Saleh Ramli
Ketua Bidang Human Trafficking	: Hj. Jamilah Abdul gani, SH, MH
Ketua Bidang Perlindungan Anak dan Remaja	: Dani Irawati Soenarso, M.Si.
Ketua Bidang Pengembangan Potensi Anak dan Remaja	: Athina Siti Khadijah P
Ketua Bidang Pengelolaan Lingkungan Ramah Anak dan Remaja	: Dinda Fajria
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi	: Habiburokhman, SH, MH
Ketua Bidang Advokasi	: M. Maulana Bungaran, SH, MH.
Ketua Bidang Hukum	: Munathsir Mustaman, SH
Ketua Bidang Hukum ITE	: M. Said Bakhrie, S.Sos,SH,MH.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Ketua Bidang Penanganan Perselisihan Sengketa Pemilu	: RR. Duni Nibayati, SH
Ketua Bidang Kajian Hukum	: Hendarsam Marantoko, SH,CLA
Ketua Bidang Konstitusi	: Benny Uzer, SH
Ketua Bidang Konstitusi Tata Negara	: Eva Yulianti, SH
Ketua Bidang Advokasi Kepartaian	: Yunico Syahrir, SH
Ketua Bidang Hukum Ekonomi	: Henocho Thomas, SE, MM
Ketua Bidang Hukum Perdagangan	: Ade Salamah, SH, MH.
Ketua Bidang Advokasi Perempuan dan Anak	: Dermawati Harefa, SH
Ketua Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual	: Andika Sefatia Mendrofa
Ketua Bidang Layanan Hukum	: Muhammad Randy Effendi
Wakil Ketua Umum Pengabdian Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	: dr. Sumarjati Arjoso, SKM.
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	: Tri Maryani
Ketua Bidang Pembangunan Kemasyarakatan	: Sudewo, ST, MT
Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Dr. A.S. Kobalen, M.Phil, Ph.D.dillit.
Ketua Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	: Agnes Marcelina
Ketua Bidang Perlindungan Fakir Miskin	: Soedarto SM
Ketua Bidang Perlindungan Ibu Hamil dan Menyusui	: Tjut Andjani Yuzar
Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Kaum Difabel	: Ariena
Ketua Bidang Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	: Endang Wahyudi Mamahit
Ketua Bidang Komunikasi Sosial Kemasyarakatan	: Martianis, SH
Ketua Bidang Pelayanan Sosial	: Ir. Hj. R. Monica Armi Soraya
Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Infrastruktur	: Susi Marleny Bachsin, SE, MM.
Ketua Bidang Pendidikan Nasional	: Prof. Dr.Ir. Djohar Arifin Husin
Ketua Bidang Pendidikan Tinggi	: Ir. Sumail Abdullah
Ketua Bidang Pendidikan Menengah	: Ir. Priscilia Ester Waworuntu, MT
Ketua Bidang Pendidikan Dasar	: Dr. Ririn Wulandari, SE, MM
Ketua Bidang Pendidikan Formal	: Indah Wahyuarini Retno U
Ketua Bidang Pendidikan Non Formal	: Martina, S.I.Kom, M.Si.
Ketua Bidang Kurikulum Pendidikan Nasional	: Indah Riyanti Brown
Ketua Bidang Kesenian Nasional	: Jamal Mirdad
Ketua Bidang Kebudayaan Nasional	: R. Wulandari (Mulan Jameela)
Ketua Bidang Perfilman Nasional	: Rachel Maryam Sayyidina
Ketua Bidang Perumahan Rakyat	: Ir. Meireza Endipat Wijaya
Ketua Bidang Konstruksi	: Sudarsono S, ST.
Ketua Bidang Pekerjaan Umum	: Ir. Aria Sulhan Witoelar
Ketua Bidang Percepatan dan Pembangunan Daerah	: Ir. Putri Tjatur Budilistiyani, MM
Ketua Bidang Pembangunan Pedesaan	: Subuh Prabowo
Wakil Ketua Umum Bidang Agama	: Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan Hasyim)
Ketua Bidang Agama Islam	: H. Tabrani Syabirin, LC, MH.
Ketua Bidang Agama Kristen	: Dra. Vonny Sumampouw Pangemanan
Ketua Bidang Agama Katholik	: Haposan Paulus Batubara, SH
Ketua Bidang Agama Budha	: Romo Pdt. Gouw Tjeng Sun, S.Dt.B
Ketua Bidang Agama Hindu	: Ida Bagus Yoga Adi Putra, SH, M.Kn.
Ketua Bidang Agama Konghucu	: Sanjaya Sutandar

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM - lanjutan

Sekretaris Jenderal	: H. Ahmad Muzani
Wakil Sekretaris Jenderal	: Brigjen TNI (Purn) Anwar Ende, SIP.
Bendahara Umum	: Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA
Wakil Bendahara Umum	: Ir. Simon Aloysius Mantiri, ST, MBA
	: Satrio Dimas Adityo, MBA

Visi :

Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Misi :

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atas latar belakang golongan.
5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat disetiap tingkat pemerintahan.

Fungsi dan Tugas

Fungsi :

1. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa.
2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
3. Menghimpun dan merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat Pancasila.
5. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.
6. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan disegala bidang.
8. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tugas :

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi aspek-aspek, ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional.
3. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.
5. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggara negara.
6. Mempersiapkan kader-kader Partai terbaik dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan.
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta bebas dari segala bentuk korupsi, penyelenggaraan kekuasaan politik.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti dijabarkan dibawah ini

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia ("SAK ETAP"). Penyajian laporan keuangan disusun berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) 35 " Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba", yang merupakan perubahan dari PSAK 45. Berisi laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan Partai Gerindra hanya meliputi laporan keuangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), bukan merupakan laporan konsolidasi Partai dari tingkat ranting, cabang dan wilayah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Partai.

b. Kas dan setara kas

● Definisi

Menurut PSAK 2 paragraf 07, setara kas dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi dan tujuan lain. (lanjutan)

- Kas

Kas adalah alat pembayaran yang sah dan siap serta bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan partai politik. Yang termasuk kas adalah saldo kas di tangan (*cash on hand*) .

- Kas di Bank

Kas di bank adalah saldo rekening bank partai politik yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan partai politik. Yang termasuk sebagai saldo bank adalah seluruh saldo rekening partai politik yang terdapat di bank.

- Deposito

Deposito adalah investasi sementara milik partai politik. Deposito yang termasuk dalam kas dan setara kas adalah deposito yang jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

● Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas tersebut diterima oleh partai politik, baik diterima secara tunai maupun melalui transfer ke dalam rekening bank.

● Pengukuran dan Pencatatan

Besarnya saldo kas ditetapkan menurut nilai nominalnya. Saldo bank ditetapkan menurut nilai saldo rekening partai politik di bank. Saldo kas di bank pada akhir tahun dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi bank.

● Penyajian

Kas dan setara kas merupakan pos pada Laporan Posisi Keuangan yang paling likuid (lancar) sehingga disajikan pada urutan pertama aset.

● Pengungkapan

Kas dan setara kas disajikan sesuai dengan komponennya, yaitu kas, kas di bank, dan deposito. Rincian dan komponen kas dan setara kas diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi jenis, lokasi penyimpanan, jatuh tempo, dan penjelasan bahwa kas dan setara kas tersebut tidak dijamin.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

c. Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya

- **Definisi**
Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya adalah kas/bank milik partai politik yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu sehingga harus dipisahkan dari kas/bank yang lain.
- **Pengakuan**
Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat terjadinya transaksi penyesihan kas/bank untuk tujuan tertentu yang spesifik.
- **Pengukuran dan Pencatatan**
Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya diukur dan dicatat sebesar nilai kas.bank yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
- **Penyajian**
Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok aset likuid karena dapat dicairkan sewaktu-waktu tergantung tujuan tertentu yang dimiliki oleh partai politik.
- **Pengungkapan**
Catatan atas laporan keuangan partai politik mengungkapkan mengenai alasan pembatasan penggunaan kas/bank.

d. Deposito Berjangka

- **Definisi**
Deposito berjangka adalah penempatan sementara dana program partai politik dalam bentuk deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- **Pengakuan**
Investasi diakui pada saat terjadinya penyerahan penggunaan kas yang diharapkan dapat memperoleh hasil/manfaat ekonomis. Mutasi atas investasi diakui pada saat terjadi transaksi berupa pencairan deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 (tiga) bulan, atau pada saat reklasifikasi deposito untuk yang jatuh temponya menjadi 3 (tiga) bulan atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
- **Pengukuran dan Pencatatan**
Investasi dalam bentuk deposito diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- **Penyajian**
Investasi disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok Aset.
- **Pengungkapan**
Investasi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan partai politik, sebesar nilai nominal, tenor (jangka waktu) dan tingkat bunga per tahun dan informasi lain yang relevan.

e. Piutang

- **Definisi**
Piutang adalah hak partai politik untuk menagih kepada pihak lain dalam bentuk uang yang timbul dari transaksi yang dilakukan oleh partai politik. Dalam laporan keuangan partai politik, piutang dapat dibedakan
 - Piutang lancar : Piutang yang akan segera jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu periode Akuntansi (satu tahun)
 - Piutang tidak lancar : Piutang yang memiliki waktu jatuh tempo lebih lama yaitu lebih dari satu periode Akuntansi (satu tahun)

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

e. Piutang (lanjutan)

Piutang yang dimiliki partai politik dapat bersumber dari berbagai transaksi, misalnya

- Piutang bunga yang berasal dari transaksi dengan pihak bank
- Piutang anggota partai politik

● **Pengakuan**

Piutang diakui pada saat partai politik telah menyerahkan barang, jasa atau manfaat atas barang namun belum dilunasi oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal pelaporan.

● **Pengukuran dan Pencatatan**

Piutang dicatat sebesar jumlah yang diserahkan, jika akan diselesaikan dalam waktu satu tahun atau kurang, atau sebesar nilai kini dari perkiraan arus kas masuk masa depan dengan menggunakan tingkat bunga pasar untuk jenis pinjaman serupa.

● **Penyajian**

Piutang disajikan sebagai pos tersendiri dalam kelompok aset lancar pada laporan posisi keuangan yang dinilai sebesar nilai neto yaitu jumlah piutang yang akan diterima dikurangi dengan cadangan kerugian

● **Pengungkapan**

Partai Politik dalam catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- Klasifikasi piutang berdasarkan jenis dan jumlah brutonya, diikuti dengan cadangan kerugian penurunan
- Klasifikasi piutang atas umur piutang
- Dasar pembentukan penurunan nilai atas Piutang
- Pengungkapan lain.

f. Biaya dibayar dimuka

● **Definisi**

Beban dibayar dimuka adalah beban yang merupakan pembayaran kepada pihak lain yang belum menjadi beban untuk tahun berjalan.

● **Pengakuan**

Beban dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan pembayaran atas nilai jasa yang belum dikonsumsi selama tahun berjalan.

● **Pengukuran dan Pencatatan**

Beban dibayar dimuka diukur dan dicatat sebesar nilai jasa yang belum dikonsumsi selama tahun berjalan. Pada akhir periode, dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian terkait dengan realisasi beban dengan mengkreditkan beban dibayar dimuka.

● **Penyajian**

Beban dibayar dimuka disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset.

● **Pengungkapan**

Catatan atas laporan keuangan partai politik mengungkapkan rincian beban dibayar dimuka berdasarkan jenis dan nilai nominalnya.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus.

g. Aset Tetap

● **Definisi**

Berdasarkan PSAK 16 paragraf 06, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Aset tetap diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NILLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

g. Aset Tetap (lanjutan)

Dalam konteks partai politik, aset tetap adalah aset berwujud yang:

- Diperoleh dalam bentuk pakai atau dibangun lebih dahulu
- Digunakan dalam operasi partai politik
- Tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan
- Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

Aset tetap diklasifikasikan menjadi:

- Tanah : Tanah merupakan tempat berdirinya bangunan yang digunakan oleh partai politik.
- Inventaris dan peralatan : Peralatan merupakan aset tetap yang dimiliki partai politik, bersifat tahan lama (lebih dari satu tahun) dan digunakan dalam kegiatan partai seperti komputer, printer, TV, proyektor, sound system, perabot kantor

Aset tetap diklasifikasikan menjadi: *(lanjutan)*

- Kendaraan : Kendaraan merupakan aset tetap milik partai politik yang digunakan untuk operasional partai misalnya untuk keperluan perjalanan dinas, dan dipergunakan lebih dari satu periode akuntansi.
- Bangunan : Bangunan atau gedung merupakan aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional partai politik atau digunakan sebagai kantor pengurus atau kantor perwakilan daerah dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap berupa bangunan ini bukan merupakan bangunan yang disewa dari pihak lain atau hanya digunakan untuk kepentingan tertentu dalam waktu yang singkat.

- Perlengkapan
Perlengkapan merupakan barang habis pakai yang dimiliki suatu entitas atau barang yang dapat dipakai berulang-ulang namun memiliki ukuran atau bentuk yang relatif kecil dan digunakan untuk melengkapi pekerjaan dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Perlengkapan yang dimiliki partai politik dapat berupa

- i Alat tulis kantor seperti buku, kertas, bolpoin
- ii Tinta printer
- iii Map

● **Pengakuan**

Partai politik harus mengakui biaya perolehan aset tetap jika:

- Kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan biaya tersebut akan mengalir ke dalam partai politik
- Biaya perolehan dapat diukur secara andal

● **Pengukuran dan Pencatatan**

Berikut adalah ketentuan terkait pengukuran aset tetap partai politik:

- Aset tetap diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan berdasarkan atas harga beli ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan.
- Aset tetap yang dibangun sendiri, nilai perolehannya didasarkan atas seluruh biaya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset yang bersangkutan.
- Aset tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa beli (purchase leasing), biaya perolehannya dicatat berdasarkan seluruh nilai tunai biaya yang dibebankan dalam kontrak sewa beli.
- Aset tetap yang diperoleh melalui hibah atau transaksi pertukaran non moneter lainnya dicatat berdasarkan nilai wajar dari aset yang diperoleh atau aset yang diserahkan, dipilih mana yang lebih
- Pengeluaran-pengeluaran untuk perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat, kapasitas, dan mutu pelayanan aset tetap yang bersangkutan untuk beberapa tahun pada prinsipnya harus dikapitalisasi.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

g. Aset Tetap (lanjutan)

- Aset tetap yang tidak dipergunakan maka dikeluarkan dari pos aset tetap dan dikelompokkan sebagai aset lain-lain atau aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual.
- **Penyajian**
Berikut adalah ketentuan mengenai penyajian aset tetap pada laporan keuangan partai politik:
 - Penyajian aset tetap dalam laporan posisi keuangan dinyatakan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
 - Aset tetap disajikan secara rinci sesuai dengan jenis aset tersebut pada catatan atas laporan keuangan.
- **Pengungkapan**
Berikut merupakan ketentuan mengenai pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan partai politik:
 - Harga perolehan dan akumulasi penyusutan
 - Metode penyusutan yang digunakan
 - Masa manfaat, golongan, dan tarif penyusutan yang digunakan

h. Akumulasi Penyusutan

Semua aset tetap yang dimiliki partai politik harus dilakukan penyusutan atau depresiasi, kecuali tanah. Penyusutan dihitung berdasarkan nilai perolehan dan umur ekonomisnya. Umur ekonomis adalah umur optimal sebuah aset tetap untuk dapat dipergunakan sebuah entitas dalam mendukung kegiatan operasinya. Penyusutan dicatat sebagai beban penyusutan yang terjadi pada setiap periode dan harus diakui dalam laporan aktivitas. Tanah dan bangunan merupakan aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat terpisah meskipun keduanya diperoleh sekaligus. Pada umumnya tanah memiliki umur manfaat tidak terbatas sehingga tidak disusutkan.

Partai politik dapat melakukan penghitungan biaya penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan metode yang menghitung beban penyusutan dengan mengurangi harga perolehan dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan umur ekonomis aset. Metode garis lurus menghasilkan perhitungan beban penyusutan yang sama setiap periode.

$$\frac{\text{harga perolehan} - \text{nilai residu}}{\text{umur ekonomis}}$$

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap.

Kemudian penentuan umur ekonomis dapat dilakukan sebagai berikut:

Pengelompokan Aset		Umur ekonomis (Tahun)	Tarif (%)
I	<u>Bukan bangunan :</u>		
	- Kelompok 1	4	25
	- Kelompok 2	8	12,5
	- Kelompok 3	16	6,25
	- Kelompok 4	20	5
II	<u>Bangunan :</u>		
	- Tidak permanen	10	10
	- Permanen	20	5

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

h. Akumulasi Penyusutan (lanjutan)

Keterangan :

- Kelompok 1 : Meja, kursi, mesin fotokopi, komputer, printer, scanner, tape, televisi, sepeda motor, sepeda, telepon, faksimile, smartphone
- Kelompok 2 : AC, kipas angin, mobil
- Kelompok 3 : Mesin yang dimiliki entitas
- Kelompok 4 : Mesin berat dan bangunan

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan aktifitas pada saat terjadinya, pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan aktifitas .

i. Utang

● Pengakuan dan pengukuran

Utang diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat perjanjian kontrak. Utang jangka pendek diukur dan dicatat sebesar nilai transaksi atau perjanjian kontrak yang telah disepakati. Utang jangka panjang diakui sebesar nilai wajarnya.

Pada akhir periode akuntansi, utang diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Utang dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

● Penyajian dan pengungkapan

Utang jangka pendek disajikan dalam laporan posisi keuangan pada urutan pertama liabilitas. Utang diungkapkan dalam bentuk rincian yang memuat nama kreditur, dan jumlah utang masing-masing kreditur, dan khusus untuk utang jangka panjang pengungkapan meliputi tanggal jatuh tempo dan jaminan yang diserahkan jika ada.

j. Beban yang masih harus dibayar

● Definisi

Beban yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang masih harus dibayar partai politik karena diterimanya jasa/prestasi selama tahun berjalan tetapi belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi yang pembayarannya jatuh tempo pada tahun berikutnya.

● Pengakuan dan pengukuran

Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat diterimanya jasa/prestasi (beban sudah terjadi) selama tahun berjalan tetapi belum dilakukan pembayaran.

Biaya yang masih harus dibayar diukur dan dicatat sebesar jumlah biaya tahun berjalan yang belum dibayar.

● Penyajian dan pengungkapan

Biaya yang masih harus dibayar disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok liabilitas jangka pendek. Biaya yang masih harus dibayar diungkapkan dalam bentuk rincian biaya yang merupakan beban tahun berjalan yang belum dibayar. Rincian tersebut, sekurang-kurangnya memuat jenis beban dan jumlah nominalnya.

k. Perpajakan

- Utang pajak

● Definisi

Utang pajak adalah liabilitas pajak yang masih harus dibayar partai politik termasuk pajak-pajak yang dipungut atau dipotong dari pihak lain yang meliputi utang PPh 21, utang PPh 23/26, utang PBB, dan utang pajak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

- Utang pajak (lanjutan)
 - Pengakuan dan pengukuran
Utang pajak diakui pada saat transaksi terjadi, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Utang pajak diukur dan dicatat sejumlah pajak terutang berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - Penyajian dan pengungkapan
Utang pajak disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok liabilitas. Pengungkapan utang pajak mencakup jenis pajak dan nominal pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi organisasi Nirlaba dan yang sejenisnya, dinyatakan bahwa bantuan atau sumbangan bukan merupakan objek pajak sepanjang tidak ada hubungannya antara pemberi dan penerima sumbangan. Oleh karena itu Partai tidak menghitung dan mengakui pajak kini.

I. Provisi

- Definisi
Provisi adalah liabilitas yang waktu atau jumlahnya belum pasti atau masih diperkirakan (PSAK 57 paragraf 10). Provisi partai politik dapat berupa cadangan atau utang program kerja atau janji partai politik yang belum dipenuhi, misalnya pada saat kampanye pemilu.
- Pengakuan dan pengukuran
Provisi diakui jika memenuhi kondisi berikut ini:
 - Mempunyai kewajiban saat ini (legal atau praktis) sebagai akibat kejadian masa lalu.
 - Ada kemungkinan diperlukan aliran sumber daya keluar yang mempunyai manfaat ekonomi
 - Kewajiban dapat diestimasi dengan konsisten

m. Utang lain-lain

- Definisi
Utang lain-lain adalah liabilitas yang harus segera dibayar atau dilunasi oleh partai politik.
- Pengakuan dan pengukuran
Utang jangka pendek lainnya diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya
- Penyajian dan pengungkapan
Utang lainnya disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam kelompok liabilitas. Informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan meliputi rincian jenis utang lainnya dan informasi lainnya

n. Aset Neto

- Definisi
Aset neto adalah aset dikurangi dengan liabilitas.
- Klasifikasi aset neto
Laporan Posisi Keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang. Aset neto partai politik terdiri dari :

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

n. Aset Neto (lanjutan)

- 1) Aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya
Aset ini dapat digunakan untuk berbagai kepentingan partai politik karena tidak dibatasi penggunaannya oleh pemberi sumber daya. Pemberi sumber daya tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu terhadap aset yang diberikan. Dengan demikian partai politik dapat mengelola aset tersebut sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan yang diperlukan.
- 2) Aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya
Aset yang sudah ditentukan peruntukannya oleh pemberi sumber daya sehingga partai politik tidak bisa menggunakan aset tersebut untuk keperluan lain. Dengan demikian aset dibatasi penggunaannya sesuai dengan maksud dan tujuan pemberi sumber daya.

Aset neto yang berasal dari dana APBN jika merupakan sisa kas dana anggaran yang akan dikembalikan ke Kas Negara, tetapi jika berupa aset tetap akan dipindahkan ke Partai.

o. Penerimaan

● Definisi

Penerimaan dalam partai politik adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal partai politik selama periode tertentu dimana arus masuk tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan aset neto milik partai politik yang tidak berasal dari penanaman modal.

Pendapatan (penerimaan) partai politik merupakan penerimaan partai politik yang diperoleh dari iuran anggota maupun pihak ketiga, yang meliputi sumbangan non-anggota, donatur, penyumbang perseorangan maupun organisasi, serta dari pemerintah. Menurut ISAK 35, penerimaan pada ENBL termasuk partai politik akan dikategorikan sebagai penerimaan dengan pembatasan (*with restriction*) dan penerimaan sumbangan tanpa pembatasan (*without restriction*).

Penerimaan sumbangan juga bisa diidentifikasi apakah sumbangan tersebut berasal dari sumbangan anggota atau sumbangan non-anggota (pihak ketiga). Contoh rinciannya adalah sebagai berikut

- 1). Penerimaan sumbangan tanpa pembatasan
 - Penerimaan dari anggota
 - Penerimaan non-anggota perorangan
 - Penerimaan institusi/organisasi/perusahaan
 - Penerimaan sumbangan pemerintah
- 2). Penerimaan sumbangan dengan pembatasan
 - Penerimaan dari anggota
 - Penerimaan non-anggota perorangan
 - Penerimaan institusi/organisasi/perusahaan

● Klasifikasi

Penerimaan partai politik berasal dari sumber-sumber berikut:

- 1) Dana APBN
- 2) Iuran anggota partai politik
- 3) Sumbangan, dapat berupa sumbangan anggota, sumbangan pengurus dan sumbangan pihak ketiga baik perorangan maupun lembaga.

● Klasifikasi

- 1) Penerimaan Dana APBN/APBD

● Definisi

Penerimaan dari Dana APBN adalah sumbangan negara yang berasal dari APBN/APBD yang digunakan untuk kepentingan pendidikan partai politik bagi anggota partai politik dan masyarakat luas serta dapat juga digunakan untuk pembiayaan operasional sekretariat partai politik.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

o. Penerimaan (lanjutan)

- Pengakuan dan pengukuran

Penerimaan Dana APBN/APBD diakui pada saat diterimanya dana sumbangan dari negara.

Penerimaan Dana APBN/APBD diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang diterima dari sumbangan negara yang berasal dari APBN/APBD.

- Penyajian dan pengungkapan

Penerimaan Dana APBN/APBD disajikan dalam Laporan Aktivitas pada kelompok Penerimaan. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah rincian penerimaan dari sumbangan APBN/APBD dan informasi terkait lainnya yang relevan.

2) Iuran Anggota Partai Politik

- Definisi

Iuran anggota partai politik merupakan penerimaan yang berasal dari sejumlah dana yang dibayarkan oleh anggota partai politik yang sifatnya tetap dan rutin.

- Pengakuan dan pengukuran

Iuran anggota partai politik diakui pada saat diterimanya dana iuran rutin yang berasal dari anggota partai politik.

Penerimaan dari iuran anggota partai politik diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang diterima dari iuran yang dibayarkan oleh anggota partai politik.

- Penyajian dan pengungkapan

Penerimaan yang bersumber dari iuran partai politik disajikan dalam Laporan Aktivitas pada kelompok penerimaan.

Informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah rincian terkait dengan iuran anggota serta informasi terkait lainnya yang relevan.

3) Sumbangan

- Definisi

Sumbangan yang sah menurut hukum meliputi sumbangan yang berasal dari pihak ketiga perorangan dan lembaga/ organisasi/ institusi. Sumbangan dari anggota merupakan sumbangan dari anggota dan kader partai politik. Sumbangan anggota akan mendorong keterlibatan anggota partai politik dalam memajukan dan membesarkan partai politik.

- Pengakuan dan pengukuran

Sumbangan diakui pada saat dana atau barang yang diterima oleh partai politik. Sumbangan diukur dan dicatat sebesar nilai sumbangan atau nilai wajar barang yang diterima.

- Klasifikasi

3) Sumbangan

- Penyajian dan pengungkapan

Sumbangan disajikan dalam Laporan Aktivitas pada kelompok Penerimaan. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah rincian pemberi sumbangan dan jumlah sumbangan serta informasi lainnya yang relevan.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NILLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

p. Pengeluaran/Beban

- **Definisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan penurunan aset neto yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Komponen Pengeluaran/Beban dalam Laporan Keuangan

1) Beban Administrasi dan Umum

- **Definisi**

Beban administrasi dan umum adalah beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penunjang (administrasi) partai politik. Contoh beban ini adalah pembelian alat tulis kantor, beban listrik, beban telepon dan lain-lain.

- **Pengakuan dan pengukuran**

Beban administrasi dan umum diakui pada saat beban tersebut telah menjadi liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh partai politik. Beban administrasi dan umum diukur dan dicatat sebagai beban yang telah menjadi liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh partai politik.

- **Penyajian dan pengungkapan**

Beban administrasi dan umum disajikan pada kelompok beban atau pengeluaran dalam laporan aktivitas.

2) Beban pemeliharaan

- **Definisi**

Beban Pemeliharaan adalah beban untuk perbaikan/ perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat ekonomi masa yang akan datang dan untuk mempertahankan standar kerja semula atas suatu aset, yang dibebankan pada tahun berjalan. Beban pemeliharaan meliputi beban pemeliharaan inventaris dan peralatan, beban pemeliharaan kendaraan, dan beban pemeliharaan bangunan/kantor.

- **Pengakuan dan pengukuran**

Beban Pemeliharaan diakui pada saat beban tersebut telah menjadi Liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh partai politik. Beban Pemeliharaan diukur dan dicatat sebesar jumlah beban yang telah menjadi Liabilitas.

- **Penyajian dan pengungkapan**

Beban Pemeliharaan disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan Aktivitas. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan rincian besarnya Biaya Pemeliharaan untuk masing-masing jenis Beban Pemeliharaan.

Komponen Pengeluaran/Beban dalam Laporan Keuangan

3) Beban sewa

- **Definisi**

Beban Sewa adalah beban untuk penyewaan barang/aset tertentu yang dibebankan pada tahun berjalan.

- **Pengakuan dan pengukuran**

Beban Sewa diakui pada saat beban tersebut telah menjadi Liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh partai politik. Beban Sewa diukur dan dicatat sebesar jumlah beban yang telah menjadi Liabilitas.

- **Penyajian dan pengungkapan**

Beban Sewa disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan Aktivitas.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

p. Pengeluaran/Beban (lanjutan)

4) Beban penyusutan aset tetap

● **Definisi**

Beban Penyusutan merupakan alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat diestimasi.

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan dan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh.

Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan oleh partai politik. Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aset dikurangi nilai sisanya.

Beban Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Beban Penyusutan Inventaris dan Peralatan, Beban Penyusutan Kendaraan, dan Beban Penyusutan Bangunan.

● **Pengakuan dan pengukuran**

Beban Penyusutan diakui pada akhir periode akuntansi. Beban Penyusutan diukur dan dicatat sebesar jumlah beban penyusutan dari masing-masing aset yang dimiliki berdasarkan metode penyusutan yang digunakan. Metode yang digunakan adalah Metode Garis Lurus.

● **Penyajian dan pengungkapan**

Beban Penyusutan disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan Aktivitas. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan rincian besarnya Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis aset.

5) Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

● **Definisi**

Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman adalah beban yang timbul karena penyisihan atas piutang yang mungkin tidak tertagih.

● **Pengakuan dan pengukuran**

Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman diakui pada akhir periode akuntansi. Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman diukur dan dicatat sebesar selisih jumlah penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman tahun berjalan dengan jumlah penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman pada tahun sebelumnya.

Komponen Pengeluaran/Beban dalam Laporan Keuangan

5) Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

● **Penyajian dan pengungkapan**

Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan Aktivitas. Pengungkapan Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman mencakup perhitungan beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman.

6) Beban pajak

● **Definisi**

Beban Pajak merupakan jumlah pajak yang ditanggung oleh partai politik. Pajak-pajak dimaksud dapat berupa PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, dan/atau pajak lainnya, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

● **Pengakuan dan pengukuran**

Beban Pajak diakui pada saat transaksi terjadi, berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Beban Pajak diukur dan dicatat sebesar jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

p. Pengeluaran/Beban (lanjutan)

- Penyajian dan pengungkapan
Beban Pajak disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan Aktivitas. Pengungkapan Beban Pajak dalam bentuk rincian yang memuat jenis pajak dan jumlah Beban Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 7) Beban dan pengeluaran lainnya
 - Definisi
Beban dan Pengeluaran Lainnya adalah pengeluaran- pengeluaran yang dibayarkan oleh partai politik dalam rangka aktivitas partai politik yang tidak dapat dikategorikan pada pos lainnya. Termasuk dalam kelompok Beban dan Pengeluaran Lainnya adalah Beban Bunga.
 - Pengakuan dan pengukuran
Beban dan Pengeluaran Lainnya diakui pada saat telah menjadi Liabilitas. Beban dan Pengeluaran Lainnya diukur dan dicatat sebesar beban atau pengeluaran yang telah menjadi Liabilitas.
 - Penyajian dan pengungkapan
Beban dan Pengeluaran Lainnya disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan Aktivitas. Beban dan Pengeluaran Lainnya diungkapkan dalam bentuk kelompok beban beserta nilai dan informasi lainnya yang relevan.

Pengeluaran partai terdiri dari :

A. Pengeluaran beban, dicatat di Laporan Aktivitas sebagai komponen beban

Pengeluaran beban bisa dikategorisasikan dalam beberapa kategori besar, antara lain:

1) Beban penerimaan kas dari APBN/APBD

Bantuan keuangan partai politik yang berasal dari APBN/APBD harus dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan di bawah ini, yaitu :

- a). Pendidikan politik – pertemuan politik, edukasi, menjaring aspirasi, kaderisasi
- Pendidikan Politik bagi anggota partai politik dan masyarakat
- Kegiatan pendidikan politik dapat berupa :
- Seminar
 - Lokakarya
 - Dialog interaktif
 - Sarasehan
 - *Workshop*
 - Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik

Pengeluaran untuk kegiatan pendidikan politik dapat berupa :

- Pembayaran honorarium
- Pembayaran transport kegiatan
- Akomodasi dan konsumsi; dan
- Pengadaan perlengkapan peserta kegiatan

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

p. Pengeluaran/Beban (lanjutan)

b). Operasional sekretariat :

Kegiatan operasional sekretariat partai politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan :

i) Administrasi umum

Beban administrasi umum komponennya adalah :

- * Keperluan alat tulis kantor
- * Rapat internal sekretariat
- * Perjalanan dinas kader partai politik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik
- * Transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat
- * Pengadaan barang inventaris, anatara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi
- * Sewa kantor, dan
- * Honor tenaga administrasi sekretariat parta politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- * Konsumsi untuk pendidikan politik,

ii) Berlangganan barang dan jasa

Berlangganan barang dan jasa antara lain :

- * Telepon, internet dan listrik
- * Air minum sekretariat
- * Jasa pos dan giro
- * Surat menyurat, atau
- * Media cetak dan elektronik

iii) Pemeliharaan data dan arsip

Pemeliharaan data dan arsip seperti :

- * Penyimpanan data elektronik, dan/atau
- * Penyimpanan data manual

iv) Pemeliharaan peralatan kantor

Pemeliharaan peralatan kantor antara lain :

- * Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat, dan/atau
- * Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat

2) Beban kegiatan DPP/DPD

- a) Beban kongres luar biasa
- b) Beban peringatan hari nasional
- c) Beban rapat koordinasi DPP-DPC

3) Beban program bidang

- a) Bidang politin, hukum dan keamanan
- b) Beban operasional bidang kesehatan
- c) Pelatihan kaderisasi partai

4) Beban kampanye

Merupakan beban yang dikeluarkan atas pelaksanaan kampanye

5) Beban sumbangan pemilihan presiden

Merupakan beban yang dikeluarkan atas pelaksanaan kampanye pemilihan presiden untuk partai yang mengajukan calon presiden.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

p. Pengeluaran/Beban (lanjutan)

Pengeluaran partai terdiri dari : *(lanjutan)*

- 6) Beban bakti sosial
 - a) Beban bantuan bencana alam
 - b) Beban bantuan beasiswa
 - c) Beban bantuan kepada masyarakat umum
- 7) Beban publikasi dan humas
 - a) Beban atribut partai
 - b) Beban pembayaran domain dan website
 - c) Beban iklan
 - d) Beban hukum dan advokasi partai
 - e) Beban media center dan team online
- 8) Beban kegiatan sayap partai
Merupakan beban untuk membiayai kegiatan sayap partai
- 9) Beban lain-lain
- 10) Beban administrasi dan umum
 - a) Beban operasional
 - b) Beban sewa gedung
 - c) Beban gaji dan tunjangan
 - d) Beban transportasi dan perjalanan dinas
 - e) Beban pemeliharaan aset tetap
 - f) Beban penyusutan aset tetap
 - g) Beban listrik, telepon dan internet
 - h) Beban jamuan
 - i) Beban konsumsi
 - j) Beban jasa keamanan dan kebersihan
 - k) Beban jasa profesional
 - l) Beban rapat internal pengurus
 - m) Perizinan, hukum dan advokasi
 - n) Beban seragam karyawan dan pengurus
 - o) Beban rumah tangga
 - p) Lainnya

B. Pengeluaran untuk pembelian aset, pengeluaran ini dicatat dan dikapitalisasi dalam Laporan Posisi Keuangan

- 1) Pembelian perlengkapan (kertas, ATK dll)
- 2) Pembelian peralatan (komputer, printer, meja, kursi, AC dll)
- 3) Pembelian kendaraan
- 4) Pembelian gedung (bangunan)
- 5) Pembelian tanah
- 6) Pembelian investasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 tahun 2020 telah mengatur jenis pengeluaran yang boleh menggunakan dana negara yang terdiri dari pengeluaran untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat partai.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NILABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 YANG DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

Partai Gerindra melakukan penyajian kembali laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2023 atas akun pendapatan diterima dimuka dan penyajian kembali akun tersebut berdampak pada akun aset neto-tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan penerimaan iuran anggota DPRD Propinsi, Kabupaten untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Dampak dari penyajian kembali pada laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	<u>Disajikan Kembali</u>	<u>Penyesuaian Penyajian Kembali</u>	<u>Dilaporkan Sebelumnya</u>
Pendapatan diterima dimuka	112.681.004.475	(112.681.004.475)	-
Aset Neto - tanpa pembatasan dari pemberi-sumber daya	58.591.709.205	112.681.004.475	171.272.713.680
Iuran anggota DPRD Provinsi, Kabupaten	141.526.528.806	112.681.004.475	254.207.533.281
Surplus (Defisit) tahun berjalan	(29.447.325.238)	112.681.004.475	83.233.679.237

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

	<u>Disajikan Kembali</u>	<u>Penyesuaian Penyajian Kembali</u>	<u>Dilaporkan Sebelumnya</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	154.355.443.951	-	154.355.443.951
Piutang lain-lain	13.701.362.051	-	13.701.362.051
Biaya dibayar dimuka	26.152.641	-	26.152.641
Jumlah Aset Lancar	<u>168.082.958.643</u>	<u>-</u>	<u>168.082.958.643</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - bersih	3.239.705.037	-	3.239.705.037
JUMLAH ASET	<u>171.322.663.680</u>	<u>-</u>	<u>171.322.663.680</u>
LIABILITAS DAN ASET BERSIH			
LIABILITAS			
Pendapatan diterima dimuka	112.681.004.475	112.681.004.475	-
Biaya yang masih harus dibayar	49.950.000	-	49.950.000
Jumlah Liabilitas	<u>112.730.954.475</u>	<u>112.681.004.475</u>	<u>49.950.000</u>
ASET NETO			
Tanpa pembatasan dari pemberi-sumber daya	58.591.709.205	112.681.004.475	171.272.713.680
Dengan pembatasan dari pemberi-sumber daya	-	-	-
	<u>58.591.709.205</u>	<u>112.681.004.475</u>	<u>171.272.713.680</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	<u>171.322.663.680</u>	<u>225.362.008.950</u>	<u>171.322.663.680</u>

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 YANG DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
31 DESEMBER 2023

	Disajikan Kembali	Penyesuaian Penyajian Kembali	Dilaporkan Sebelumnya
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI-SUMBER DAYA			
Penerimaan :			
Iuran anggota DPR RI	12.433.500.000	-	12.433.500.000
Iuran anggota DPRD Provinsi, Kabupaten	141.526.528.806	112.681.004.475	254.207.533.281
Sumbangan pengurus	449.100.000	-	449.100.000
Sumbangan perorangan	1.000.000.000	-	1.000.000.000
Penerimaan lain-lain	355.839.344	-	355.839.344
Jumlah	155.764.968.150	112.681.004.475	268.445.972.625
Penyaluran :			
Beban kegiatan DPP	2.148.000.000	-	2.148.000.000
Beban program bidang	707.700.000	-	707.700.000
Beban kegiatan sayap Partai	1.078.037.883	-	1.078.037.883
Beban kampanye	30.438.800.000	-	30.438.800.000
Beban bakti sosial	110.802.900	-	110.802.900
Beban publikasi dan kehumasan	12.262.662.400	-	12.262.662.400
Beban umum dan administrasi	138.423.944.581	-	138.423.944.581
Beban lain-lain	42.345.624	-	42.345.624
Jumlah	185.212.293.388	-	185.212.293.388
Surplus (Defisit)	(29.447.325.238)	112.681.004.475	83.233.679.237
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI-SUMBER DAYA			
Penerimaan :			
Kas Negara melalui APBN	17.594.839.000	-	17.594.839.000
Penyaluran			
Beban kegiatan Partai	17.594.839.000	-	17.594.839.000
Surplus (Defisit)	-	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	(29.447.325.238)	112.681.004.475	83.233.679.237

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
31 DESEMBER 2023

	Disajikan Kembali	Penyesuaian Penyajian Kembali	Dilaporkan Sebelumnya
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Saldo awal	88.039.034.443	-	88.039.034.443
Surplus (Defisit) tahun berjalan	(29.447.325.238)	112.681.004.475	83.233.679.237
Saldo Akhir Aset Neto Tanpa Pembatasan	58.591.709.205	112.681.004.475	171.272.713.680
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Saldo awal	-	-	-
Surplus (Defisit) tahun berjalan	-	-	-
Saldo Akhir Aset Neto Dengan Pembatasan	-	-	-
TOTAL ASET NETO	58.591.709.205	112.681.004.475	171.272.713.680

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 YANG DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Kas	535.640.673	3.948.084.879
Bank :		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	153.814.247.603	2.714.305.243
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	3.380.025	93.167.170
PT Bank Central Asia Tbk.	2.175.650	2.610.650
Jumlah	154.355.443.951	6.758.167.942

5. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Piutang Pengurus dan Anggota Partai	13.642.862.051	78.681.662.051
Piutang karyawan	58.500.000	15.750.000
Jumlah	13.701.362.051	78.697.412.051

Piutang Pengurus dan Anggota Partai

Akun ini merupakan jumlah pinjaman/kewajiban Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Anggota DPRD Provinsi & Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya kewajiban iuran anggota, pinjaman ini tidak ada jangka waktu pengembaliannya dan juga tidak dikenakan bunga.

6. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini merupakan biaya dibayar dimuka atas biaya perbaikan dan pemeliharaan gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, dengan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp26.152.641 dan Rp14.327.600.

7. ASET TETAP

Terdiri dari :

	31 Desember 2023			
	Saldo Awal	Mutasi/Reklasifikasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga perolehan :				
Kendaraan bermotor	4.405.850.000	507.792.000	-	4.913.642.000
Peralatan kantor	2.125.218.400	788.774.480	-	2.913.992.880
Perlengkapan kantor	374.798.700	1.338.500	-	376.137.200
Jumlah	6.905.867.100	1.297.904.980	-	8.203.772.080
Akumulasi penyusutan :				
Kendaraan bermotor	3.023.791.667	259.507.500	-	3.283.299.167
Peralatan kantor	834.602.257	527.233.876	-	1.361.836.133
Perlengkapan kantor	272.886.426	46.045.317	-	318.931.743
Jumlah	4.131.280.350	832.786.693	-	4.964.067.043
Nilai Buku	2.774.586.750			3.239.705.037

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NILRABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 YANG DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. ASET TETAP - lanjutan

	31 Desember 2022			
	Saldo Awal	Mutasi/Reklasifikasi		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga perolehan :				
Kendaraan bermotor	3.775.850.000	630.000.000	-	4.405.850.000
Peralatan kantor	1.207.707.400	917.511.000	-	2.125.218.400
Perlengkapan kantor	360.638.200	14.160.500	-	374.798.700
Jumlah	5.344.195.600	1.561.671.500	-	6.905.867.100
Akumulasi penyusutan :				
Kendaraan bermotor	2.879.601.563	144.190.104		3.023.791.667
Peralatan kantor	568.999.479	265.602.778		834.602.257
Perlengkapan kantor	222.510.750	50.375.676	-	272.886.426
Jumlah	3.671.111.792	460.168.558	-	4.131.280.350
Nilai Buku	1.673.083.808			2.774.586.750

Biaya penyusutan yang dibebankan ke laporan perubahan aktivitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp832.786.693 dan Rp460.168.558.

8. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Akun ini merupakan iuran gotong royong yang diterima dimuka dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari 38 Propinsi. Iuran tersebut akan digunakan untuk biaya pelaksanaan Pemilu Tahun 2024/2029 dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.681.004.475.

9. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini merupakan biaya jasa profesional yang masih harus dibayar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp49.950.000 dan Rp44.400.000.

10. HUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan hutang Partai atas pengurusan perpanjangan STNK mobil ambulance dari Perwakilan daerah-daerah seluruh Indonesia. Beban pengurusan STNK ini di talangi dahulu oleh daerah, selanjutnya akan ditagihkan ke Dewan Perwakilan Pusat. Dengan saldo per 31 Desember 2023 nihil dan 2022 sebesar Rp161.059.900.

11. PENERIMAAN DARI KAS NEGARA MELALUI APBN

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Pemilu 2019/2024	17.594.839.000	17.594.839.000

Pemilu 2019/2024

Berdasarkan Surat Keputusan Komite Pemilihan Umum Pusat No. 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum tahun 2019, yang menyebutkan jumlah perolehan kursi DPP Partai Gerindra tahun 2019 sebanyak 17.594.839 (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) suara dengan nilai satu suara Rp1.000.

Dana bantuan yang diterima DPP Partai Gerindra dari Anggaran Pendapatan dan Beban Negara (APBN) untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp17.594.839.000.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NILAI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 YANG DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

11. PENERIMAAN DARI KAS NEGARA MELALUI APBN - lanjutan

Dana bantuan keuangan Partai Politik dari Pemerintah, digunakan untuk :

1. **Pendidikan Politik** (Catatan 15)
 Untuk menunjang peningkatan kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan partisipasi politik untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila akan dilakukan dalam kegiatan :
 - a. Pelatihan Kader partai Gerakan Indonesia Raya
 - b. Seminar dan diskusi rutin
2. **Operasional Sekretariat** (Catatan 15)
 Untuk kegiatan operasional sekretariat Partai Politik yang sesuai dengan Pasal 24 Bab VII dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2009 :
 - a. Administrasi umum
 - b. Berlangganan daya dan jasa
 - c. Pemeliharaan data dan arsip
 - d. Pemeliharaan peralatan kantor

12. IURAN ANGGOTA FRAKSI GERINDRA DPR RI

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Iuran anggota periode 2019/2024	12.433.500.000	12.995.500.000

Pemilu 2019/2024

Merupakan sumbangan yang diterima dari anggota Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia hasil Pemilu 2019/2024, dimana dari Pemilu tersebut Partai Gerindra mendapatkan kursi di Gedung DPR-RI sebanyak 78 kursi atau sekitar 12,57% dan setiap anggota DPR-RI Partai Gerindra membayar iuran sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, DPP Gerindra menerima iuran anggota masing-masing sebesar Rp12.433.500.000 dan Rp12.995.500.000 dari 78 orang anggota yang duduk di kursi DPR-RI.

13. IURAN ANGGOTA DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Iuran anggota periode 2019/2024	99.694.328.806	116.059.884.515
Iuran gotong royong	41.832.200.000	-
Jumlah	141.526.528.806	116.059.884.515

Iuran anggota periode 2019/2024

Akun ini merupakan iuran wajib anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat Provinsi dan Kabupaten, sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Partai Bab X Pasal 59, yaitu iuran bulanan DPR dan DPRD sebesar 25% dari gaji dan tunjangan.

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa, untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dikenakan iuran per bulan sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) per bulan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per anggota. Dari iuran sebagian dikirim kembali ke daerah perwakilan masing-masing dan sebagian digunakan untuk operasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP). *Lihat catatan 24*

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, DPP Gerindra menerima iuran anggota masing-masing sebesar Rp99.694.328.806 dan Rp116.059.884.515 dari Dewan Pimpinan Daerah 285 anggota dan Dewan Pimpinan Cabang 1.971 anggota.

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NILABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 YANG DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

13. IURAN ANGGOTA DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA - lanjutan

Iuran gotong royong

Akun ini merupakan iuran gotong royong dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari 38 Propinsi. Iuran tersebut akan digunakan untuk pembayaran uang saksi Pemilu Tahun 2024/2029, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp41.832.200.000.

14. SUMBANGAN PENGURUS

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari Pengurus Partai yang digunakan untuk biaya operasional Partai, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp449.100.00 dan tahun 2022 nihil.

15. SUMBANGAN PERORANGAN

Akun ini merupakan sumbangan yang diterima dari perorangan yang digunakan untuk biaya operasional Partai dan biaya pelaksanaan kampanye partai periode 2024/2029, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp1.000.000.

16. PENERIMAAN LAIN-LAIN

	2023	2022
Jasagiro	179.007.875	176.832.549
Lain-lain	176.831.469	9.753.949
Jumlah	355.839.344	186.586.498

17. BEBAN PENERIMAAN KAS NEGARA MELALUI APBN

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Pendidikan Partai Politik	14.882.794.523	15.716.229.648
Beban transportasi dan perjalanan dinas	839.437.039	190.020.855
Pengadaan inventaris kantor	702.195.381	678.761.100
Beban pemeliharaan peralatan kantor	467.458.842	389.590.787
Listrik dan telepon	420.198.217	391.987.400
Beban rapat internal Pengurus	81.296.660	16.360.200
Alat tulis kantor	69.540.373	114.350.765
Media cetak dan elektronik	66.034.465	55.460.545
Beban rumah tangga	47.233.000	41.785.000
Jasa pos dan giro	18.650.500	292.700
Jumlah	17.594.839.000	17.594.839.000

DPP Partai Gerindra telah menggunakan Bantuan Partai Politik (Banparpol) dengan memprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. Proporsi Banparpol yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar 84,32% dan 89,32% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk operasional sekretariat masing-masing sebesar 15,41% dan 10,68%.

Hal tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada :

- a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NILABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 YANG DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN PENERIMAAN KAS NEGARA MELALUI APBN - lanjutan

b. Pasal 30 :

1. Ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima; dan
2. Ayat (2) yang menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

18. BEBAN KEGIATAN DPP

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Beban HUT Gerindra	2.148.000.000	350.000.000
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)	-	2.844.703.162
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)	-	819.189.800
Beban Verifikasi KPU	-	596.950.000
Jumlah	2.148.000.000	4.610.842.962

19. BEBAN PROGRAM BIDANG

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Kesehatan dan Perempuan	357.500.000	-
Tunas Indonesia Raya (Tidar)	350.000.000	388.386.750
Politik, Hukum dan Keamanan	200.000	-
Jumlah	707.700.000	388.386.750

20. BEBAN KEGIATAN SAYAP PARTAI

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Ambulance	491.324.043	939.388.923
Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira)	456.508.300	64.710.640
Kesehatan Indonesia Raya (Kesira)	130.205.540	45.000.000
Perempuan Indonesia Raya (Pira)	-	45.500.000
Jumlah	1.078.037.883	1.094.599.563

21. BEBAN KAMPANYE

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk persiapan menghadapi Pemilu 2024/2029, dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.438.800.000.

22. BEBAN BAKTI SOSIAL

Akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bantuan kegiatan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Sumbangan masyarakat	110.802.900	870.484.558

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NILABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 YANG DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

23. BEBAN PUBLIKASI DAN KEHUMASAN

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Iklan Media Cetak dan Masa	6.507.000.000	-
Beban Lembaga Survei Indonesia	2.550.000.000	550.000.000
Beban Digdaya TV	2.000.000.000	4.499.280.000
Atribut partai	1.177.948.500	2.605.000
Maintenance Website	22.833.900	178.983.808
Langganan majalah dan koran	4.880.000	7.260.000
Jumlah	12.262.662.400	5.238.128.808

Iklan Media Cetak dan Masa

Merupakan biaya yang dikeluarkan Partai atas pembuatan dan pemasangan iklan di media massa, dalam rangka menjelang Pemilu dan Pemilihan Presiden Tahun 2024.

Beban Digdaya TV

Akun ini merupakan biaya operasional setiap bulannya Digdaya TV (PT Digdaya Media Nusantara) yang digunakan untuk acara siaran Partai Gerindra di seluruh Indonesia.

Atribut partai

Merupakan biaya yang dikeluarkan DPP Partai atas pembuatan kaos, bendera, pin serta biaya pengiriman atribut-atribut tersebut diseluruh Indonesia.

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Beban operasional	128.093.639.537	100.884.506.140
Gaji dan tunjangan	5.645.000.100	3.851.350.000
Beban transportasi dan perjalanan dinas	1.596.940.415	2.337.216.440
Beban penyusutan aset tetap	832.786.693	460.168.558
Beban BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	452.749.562	415.403.000
Beban jamuan	330.263.422	142.210.465
Beban pemeliharaan	245.925.772	111.815.764
Beban pajak PPh Pasal 21	243.416.443	71.399.266
Listrik, telepon dan internet	194.115.465	113.929.150
Alat tulis kantor dan percetakan	129.902.859	11.635.435
Beban inventaris dan perlengkapan kantor	98.910.947	14.615.483
Beban rumah tangga	59.286.555	77.068.402
Beban seragam karyawan & pengurus	50.450.000	9.364.000
Beban jasa profesional	49.950.000	61.900.000
Beban rapat internal Pengurus	31.408.494	2.461.100
Biaya pengiriman barang	29.331.500	422.200
Beban jasa keamanan dan kebersihan	15.150.000	16.300.000
Beban kebutuhan kantor	4.602.810	4.275.850
Lain-lain	320.114.007	547.500.086
Jumlah	138.423.944.581	109.133.541.339

Beban Operasional

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Beban operasional Sekretariat	84.019.035.477	58.586.535.140
Beban operasional DPD dan DPC	41.439.472.000	41.395.906.000
Beban operasional Bendahara	2.000.000.000	164.065.000
Beban operasional Tim Online	635.132.060	738.000.000
Jumlah	128.093.639.537	100.884.506.140

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
(ORGANISASI NIRLABA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 YANG DISAJIKAN KEMBALI
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI - lanjutan

Beban Operasional

Beban operasional DPD dan DPC

Akun ini merupakan beban operasional Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang dananya dari iuran bulanan anggota Dewan-Dewan Daerah setelah dipotong untuk biaya operasional Dewan Pimpinan Pusat. *(lihat catatan 13)*

25. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan biaya administrasi bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp42.345.624 dan Rp18.352.724.

26. DANA TANPA PEMBATAAN

	2023	2022
<u>Penerimaan dana tanpa pembatasan : [a]</u>		
Iuran anggota DPR RI	12.433.500.000	12.995.500.000
Iuran anggota DPRD Provinsi, Kabupaten	141.526.528.806	116.059.884.515
Sumbangan pengurus	449.100.000	-
Sumbangan perorangan	1.000.000.000	-
Penerimaan lain-lain	355.839.344	186.586.498
Jumlah	155.764.968.150	129.241.971.013
<u>Beban Penyaluran : [b]</u>		
Beban kegiatan DPP	2.148.000.000	4.610.842.962
Beban program bidang	707.700.000	388.386.750
Beban kegiatan sayap Partai	1.078.037.883	1.094.599.563
Beban kampanye	30.438.800.000	-
Beban bakti sosial	110.802.900	870.484.558
Beban publikasi dan kehumasan	12.262.662.400	5.238.128.808
Beban umum dan administrasi	138.423.944.581	109.133.541.339
Beban lain-lain	42.345.624	18.352.724
Jumlah	185.212.293.388	121.354.336.704
Kenaikan (penurunan) aset netto tanpa pembatasan [a - b]	(29.447.325.238)	7.887.634.309
Aset netto tanpa pembatasan awal tahun	88.039.034.443	80.151.400.134
Aset netto tanpa pembatasan akhir tahun	58.591.709.205	88.039.034.443

27. DANA DENGAN PEMBATAAN

	2023	2022
<u>Penerimaan dana dengan pembatasan : [a]</u>		
Penerimaan Kas Negara melalui APBN	17.594.839.000	17.594.839.000
<u>Beban Penyaluran : [b]</u>		
Beban Penerimaan Kas Negara mealalui APBN	17.594.839.000	17.594.839.000
Kenaikan (penurunan) aset netto tanpa pembatasan [a - b]	-	-
Aset netto tanpa pembatasan awal tahun	-	-
Aset netto tanpa pembatasan akhir tahun	-	-

28. PERSETUJUAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra bertanggung jawab untuk penerbitan kembali *(reissued)* dan penyajian kembali *(restated)* atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang diselesaikan pada tanggal 21 Juli 2025.